

ISU-ISU KRITIS MENUJU MASYARAKAT MADANI INDONESIA

*Arba'atun**

Abstract: It is not coincidence if in the opening of the 1945th Constitution said that the aim of creating the unitary Republic Indonesia is to the intellectual life of the nation. Intelligent nation is a nation that is produced by the educational system. Therefore, increasing the role of education in achieving a new Indonesian society is a manifestation of the reform movement of society and the nation of Indonesia. The new Indonesian society that we are building is Indonesian civil society.

Kata Kunci: *Pendidikan Menuju Masyarakat Madani*

PENDAHULUAN

Pada saat ini wakil-wakil masyarakat Indonesia yang berkumpul dalam Sidang Umum MPR sedang menyusun suatu konsep masyarakat Indonesia baru. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 masyarakat dan bangsa Indonesia telah mencoba mewujudkan suatu masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan ingin diwujudkan di dalam UUD 1945. Pada masa Orde Lama masyarakat yang dicita-citakan melalui kehidupan politik yang meremehkan perkembangan kehidupan ekonomi sehingga masyarakat Indonesia termasuk bangsa yang termiskin di dunia. Pada masa Orde Baru selama 32 tahun masyarakat dan bangsa Indonesia dijadikan sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang justru hanya menguntungkan sekelompok kecil anggota masyarakat di dalam sistem pemerintahan yang otoriter. Perkembangan ekonomi dicapai melalui program-program yang menjadikan manusia sebagai alat untuk mencapai target-target ekonomi dan pemupukan kekuasaan dari sekelompok kecil manusia, Hak-hak asasi diinjak-injak dan pembangunan dilaksanakan tanpa perasaan (Bawsir, 1999). Dalam era reformasi dewasa ini kita ingin mewujudkan suatu masyarakat Indonesia baru yang menghargai nilai-nilai dan hak asasi manusia, suatu masyarakat terbuka dan demokratis serta penuh toleransi di atas kenyataan kebhinekaan bangsa Indonesia, menuju satu bangsa Indonesia yang bersatu adil dan makmur.

A. MASYARAKAT INDONESIA BARU

1. Realitas Kehidupan Masyarakat Indonesia

Kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia sangat beragam. Keragaman tersebut bukanlah merupakan kelemahan tetapi justru merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Di dalam keanekaragaman masyarakat dan budaya tersebut memang mengandung potensi lahirnya sukuisme atau pandangan-pandangan sempit yang mengagungkan kelompok atau suku tertentu sehingga merupakan bahaya bagi kehidupan kesatuan bangsa. Namun demikian suatu bentuk kehidupan yang nyata bukanlah mengasingkan seorang individu dari lingkungan budayanya. Justru di dalam lingkungan budayanya sendirilah seorang akan menemukan identitasnya. Persoalan yang cenderung terjadi bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ialah pada saat yang bersamaan perlu dikembangkan pula identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai tujuan hidup bersama.

Kita adalah produk dari lingkungan kita, dari kebudayaan di sekitar kita, dari kebudayaan suku di mana kita hidup dan sekaligus pula merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang ingin kita wujudkan. Dan bukan sebaliknya kita mulai dengan suatu kebudayaan yang abstrak yang masih di dalam proses pembentukannya yaitu kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia merupakan suatu tugas setiap individu untuk mengembangkannya terutama melalui proses pendidikan. Kendala-kendala yang dapat menjadi halangan di dalam proses terbentuknya identitas seorang Indonesia ialah kehidupan politik, ekonomi, hukum yang meremehkan hak-hak individu atau kelompok yang mempunyai sub-budayanya masing-masing.

Dalam kehidupan politik yang sentralistis yang menafikan hak-hak individu tentunya akan melahirkan rasa curiga kepada kelompok yang dominan, apalagi jika kelompok tersebut memupuk kekuasaan dengan mengingkari hak-hak yang sama dari kelompok yang lain. Kekuasaan yang terpusat, apalagi yang dipusatkan kepada segelintir orang, akan bertendensi untuk korupsi. Budaya KKN lahir dari budaya kekuasaan yang sentralistik karena tidak mempunyai kontrol masyarakat luas.

Budaya KKN memang berseberangan dengan budaya demokrasi. Di dalam bidang ekonomi selama Orde Baru telah terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara sekelompok kecil masyarakat yang kaya dan sekelompok besar masyarakat yang miskin. Proses pemiskinan semakin lama semakin cepat sedangkan kelompok yang berkuasa mendapatkan bagian yang terbesar dari hasil kerja rakyat banyak. Dalam bidang hukum kita lihat hukum tidak berlaku pada penguasa sehingga supremasi hukum tidak dapat ditegakkan. Akibatnya ialah rakyat kecilmenderita, sedangkan para penguasa berada di atas hukum.

2. Masyarakat Madani Indonesia

Kita sepakati bahwa masyarakat baru yang kita cita-citakan untuk diwujudkan ialah suatu masyarakat madani Indonesia (civil society). Di dalam ilmu politik konsep masyarakat madani (civil society) yang telah mulai dikembangkan oleh para filsuf sejak jaman Yunani purba. Pada dasarnya hubungan antara individu dengan masyarakatnya berkisar pada suatu model atau hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, cara untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan itu sendiri. Plato mengajarkan bahwa tujuan hidup bersama ialah keadilan. Dengan adanya keadilan dapat dikembangkan potensi rakyat. Potensi yang telah berkembang pada gilirannya akan berwujud hasil karya. Dengan karyanya itu rakyat dapat memperkuat wewenang penguasa. Dalam konsep ini potensi individu harus dikembangkan. Tanpa pengembangan potensi tidak ada yang dapat disumbangkan oleh individu kepada penguasa.

Dengan demikian wewenang penguasa untuk menciptakan keadilan tidak dapat diciptakan. Aristoteles, seorang filsuf yang realistik menekankan kepada perlunya supremasi hukum. Konstitusi adalah sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu kebahagiaan. Dengan tujuan kebahagiaan tersebut dapat dilahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi individu. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah pilihan-pilihan. Inilah negara yang bijaksana menurut Aristoteles, penguasa berkewajiban untuk menyiapkan atau menyediakan pilihan-pilihan. Penguasa yang tidak dapat menyediakan pilihan adalah penguasa yang otoriter. Demikian pula pendidikan yang tidak dapat mengembangkan kemampuan untuk memilih bukanlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara.

Di dalam bukunya yang terkenal *The Social Contract*, Rousseau mengemukakan pentingnya pengakuan adanya hak-hak individu. Menyerahkan kebebasan individu adalah menyerahkan kualitasnya sebagai seorang manusia. Oleh sebab itu suatu perjanjian misalnya untuk membentuk negara bukannya memberikan-wewenang absolut atau kepatuhan yang tidak terbatas kepada pemegang hak-hak yaitu individu.(Diane Ravitch, 101 110).

Para filsuf Islam antara lain Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Gazali, Ibn Taymiah dan Ibn Khaldun juga mempunyai konsep-konsep mengenai hubungan antara individu dengan negara. Al-Farabi mengatakan bahwa kebahagiaan bukan saja dari segi material tetapi juga spiritual oleh sebab itu kehidupan dunia juga harus berarti mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Al-Mawardi terkenal dengan teori Kontrak Sosial. Perbedaan individu dalam inteligensi dan bakat mendorong manusia untuk bekerja sama. Adanya negara merupakan suatu kontrak sosial atau perjanjian sukarela antara anggotanya. Al-Gazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial sehingga dia harus bekerjasama. Kerjasama diperlukan untuk melanjutkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Selain itu manusia harus membantu menyediakan kebutuhan hidup yang esensial seperti pendidikan dan sandang-pangan. Ibn Taymiah melihat manusia sebagai makhluk sosial yang secara alamiah mampu mengatur ij'timak dan berbagai aturan seperti mematuhi pimpinan yang terpilih demi untuk mencapai cita-cita bersama. Ibn Khaldun berpendapat bahwa manusia dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan diri.

Apakah ciri-ciri utama dari suatu masyarakat madani universal? Di dalam uraian Hikam(1996: 27-116) yang mengambil pemikiran seorang ahli politik Prancis Alexis de Tocqueville dikemukakan mengenai ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:

- a. Kesukarelaan. Masyarakat madani bukanlah suatu masyarakat paksaan tetapi yang mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian tanggung jawab pribadi menjadi sangat penting sebagai pengikat keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

- b. Keswasembadaan. Artinya masyarakat madani tidak tergantung kepada negara, juga tidak tergantung kepada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan yang penuh percaya diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakatnya.
- c. Kemandirian tinggi terhadap negara. Masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk negara. Negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah negara yang berkedaulatan rakyat.
- d. Kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang dipatuhi bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mengakui supremasi hukum.

Masyarakat Indonesia mempunyai ciri-cirinya yang khas. Berdasarkan ciri-cirinya yang khas inilah dibangun suatu masyarakat madani Indonesia menuju masyarakat madani yang universal. Masyarakat madani Indonesia mempunyai ciri-ciri antara lain adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional. Di dalam keanekaragaman budaya Indonesia ini penting diperlukan saling pengertian dari sesama anggotanya, yang diperlukan di dalam kondisi tersebut bukan sekadar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai, yang penting di dalam masyarakat yang bhineka ialah adanya saling pengertian. Perbedaan bukan merupakan kelemahan tetapi justru merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat madani. Konflik nilai-nilai tidak selalu berarti disintegrasi. Justru di dalam masyarakat demokratis, terjadinya benturan-benturan nilai akan memperkaya horison kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan perlunya toleransi yang tinggi, juga penting menumbuhkan saling pengertian dan bukan indoktrinasi yang berusaha untuk melenyapkan perbedaan. Indoktrinasi untuk mencapai kesamaan yang dipaksakan merupakan toleransi yang semu.

Terbentuknya masyarakat madani Indonesia yang bhinneka tidak terlepas dari terbentuknya kelas menengah.(Hikam, 1996: 27-116) Kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas. Kelas menengah yang terutama berada di kota-kota telah dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Kelas menengah inilah yang relatif telah mempunyai kesadaran politik yang tinggi, tingkat partisipasi di dalam hidup bermasyarakat, dan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Yang menjadi masalah selama Orde Baru ialah ketiadaan pemimpin yang dapat digugu dan bermoral tinggi. Krisis kehidupan yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini disebabkan karena krisis kepercayaan, kekerasan, korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Krisis tersebut merupakan krisis moral dan etika para pemimpin yang telah membawa masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam kehidupan keterpurukan, kita sebagai bangsa Indonesia kehausan di bawah air pancuran dan kelaparan di atas lumbung padi.

Masyarakat madani Indonesia yang akan kita wujudkan adalah masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonoml masyarakat yang berdaya saing tinggi dan bertumpu pada pasar domestik maupun pasar internasional dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya domestik. Selanjutnya kita menginginkan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai dan norma agama yang menghormati pluralitas agama. Membangun kehidupan sosial budaya yang beradab dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sejalan dengan kehidupan dalam era globalisasi maka kita ingin membangun ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertumpukan kepada kemandirian dan daya saing bangsa dengan mengembangkan sumber daya domestik.

Di dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis kita ingin membangun sistem hukum nasional yang terbuka bagi tatanan global, mengakomodasikan hukum adat, hukum agama yang berlaku serta menormalisasikan hukum ketatanegaraan yang berlaku dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.Dengan singkat, untuk jangka panjang kita ingin mewujudkan suatu kehidupan politik yang demokratis dengan pemerintahan

yang bersih, bermoral dan bertanggung jawab. Suatu tatanan kehidupan ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang luas. Selanjutnya, kehidupan beragama yang penuh toleransi serta saling pengertian.

B. PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Apabila kita berbicara mengenai pendidikan dan politik, maka bukan berarti menjadikan pendidikan sebagai alat politik. Memang pada masa yang lalu pendidikan telah dijadikan alat kepentingan politik tertentu. Uraian di bawah ini menunjukkan keterkaitan antara proses pendidikan dan kehidupan politik dalam arti bahwa pendidikan tidak terlepas dari politik dan politik itu sendiri adalah pendidikan. (Lawrence A. Cremin, 85 127).

1. Keterkaitan antara Pendidikan dan Politik

Marilah kita kaji kembali pendapat Aristoteles mengenai hubungan antara pendidikan dan politik. Menurut Aristoteles adalah tidak mungkin kita membicarakan masalah-masalah pendidikan terlepas dari konsep kehidupan yang baik (*good life*). Masing-masing orang atau masyarakat mempunyai persepsinya sendiri mengenai apa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik (*good life*). Oleh sebab itu maka orang akan mempunyai konsep yang berjenis-jenis mengenai pendidikan. Dengan demikian masalah pendidikan akan terletak di dalam tatanan politik.

Kita lihat misalnya betapa kewajiban belajar telah lahir baik di Eropa maupun di Amerika Serikat dan Jepang sesudah lahirnya kehidupan demokrasi dalam abad 19. Tidak mungkin demokrasi dikembangkan tanpa anggotanya yang cerdas karena memperoleh pendidikan. Bahkan beberapa filsuf pendidikan seperti John Dewey melihat politik adalah pendidikan dan pendidikan adalah politik. Lihatlah Jalan pikiran John Dewey yang mengatakan bahwa pendidikan adalah metode yang paling fundamental di dalam kemajuan sosial dan reformasi. Bahkan segala bentuk reformasi yang hanya berdasar kepada pemaksaan dan hukuman akan berakhir dengan kegagalan. Dengan demikian menurut John Dewey, pendidikan adalah sarana

par excellent yang menumbuhkan kehidupan demokrasi (Amerika Serikat).(John Dewey, 81 99).

Apabila kita lihat sejarah tumbuhnya bangsa Amerika dari berbagai bangsa hanya dimungkinkan oleh adanya pendidikan seperti penggunaan bahasa Inggris, hukum Inggris dan lembaga-lembaga yang bercorak Inggris. Tidak mengherankan apabila muncul berbagai prejudice yang menguntungkan segolongan masyarakat tertentu seperti supremasi WASP (White, Anglo Saxon, Protestant). Di dalam perkembangan bangsa Amerika dilihat dari sudut luruhannya merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung. Pendidikan tidak terlepas dari komponen-komponen yang lain artinya pendidikan tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari usaha keseluruhan. Oleh sebab itu apabila terjadi krisis kehidupan seperti yang dialami masyarakat dan bangsa Indonesia dewasa ini pada hakikatnya juga merupakan refleksi dari kegagalan sistem pendidikan nasionalnya.

Dewasa ini masyarakat dan bangsa Indonesia sedang menyusun GBHN yang merupakan rancangan untuk membangun masyarakat Indonesia baru.GBHN merupakan dokumen politik dan juga merupakan dokumen pendidikan (politik). Di dalam GBHN diletakkan dasar-dasar kegiatan, lembaga-lembaga sosial (social institutions) seperti negara, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem hukum, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Seluruhnya dijadikan sebagai pegangan dari setiap manusia Indonesia untuk bekerjasama dan menggalang kekuatan bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

2. Tatanan Sosial dan Otonomi Individu

Untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama guna mencapai kebahagiaan dari suatu masyarakat diperlukan dua hal: Pertama, suatu konsep kolektif mengenai kewajiban bersama. Hal ini berarti diakuinya individualisme dan pluralisme sekaligus. Dari keduanya munculah konsep kewajiban serta kebajikan (virtue) bersama. Di dalam polarisasi antara individualisme dan pluralisme inilah terletak makna kebebasan. Dengan sendirinya tidak ada kebebasan yang mutlak, karena kebebasan pribadi dibatasi oleh kebebasan di dalam lingkungan pluralisme. Di sini dibutuhkan suatu konsepsi kolektif yang

diakui bersama mengenai apa yang disebut kebajikan bersama (common virtue). Syarat yang kedua di dalam membentuk suatu masyarakat yang baik atau sejahtera ialah adanya suatu jaringan sosial yang tersusun dengan kuat untuk menjamin kehormatan terhadap kebajikan yang telah disepakati. Dalam keadaan ini diperlukan kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan tersebut tidak ada, tidak mungkin dilahirkan dan dihormati suatu konsep kolektif mengenai kebajikan. Dengan kata lain di dalam membentuk masyarakat yang baik diperlukan individu dan pluralisme yang bergerak dalam batas-batas kemerdekaan dalam suatu jaringan kehidupan sosial bersama.

Apabila kita sepakati adanya suatu konsep kolektif artinya kita Mengakui pula adanya unsur tradisi. Tradisi pada hakikatnya berdasarkan kepada suatu keteraturan mengenai kebajikan yang pada saat yang bersamaan diramu dengan unsur-unsur modernitas. Modernitas hanya dapat lahir dengan adanya otonomi individual. Kita lihat misalnya di dalam kehidupan bersama berdasarkan kebudayaan seperti tradisi, haruslah pula dikawinkan dengan unsur-unsur modernitas di dalam dunia yang terbuka dalam era globalisasi dewasa ini. Dengan kata lain gerak suatu masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu keseimbangan antara individu dan masyarakat, atau antara hak individu dan kebaikan bersama (common good) dari masyarakat. Inilah ciri-ciri dari suatu masyarakat madani yang dinamis.

Pada suatu pihak masyarakat mengakui adanya tatanan sosial berdasarkan tradisi yang sekaligus terus-menerus berubah dan maju menyerap perubahan-perubahan yang positif sebagai peluang yang disodorkan oleh masyarakat modern. Pendidikan sebagai bagian dari proses kebudayaan sebagaimana telah dijelaskan berarti merupakan suatu proses yang terus-menerus mencari keseimbangan antara pengembangan pribadi yang berkembang di dalam kebudayaan yang terus-menerus berubah. Pribadi yang diinginkan adalah pribadi yang kritis dan produktif sambil berdiri di dalam nilai-nilai kebudayaannya.

Di dalam perkembangan masyarakat Barat menurut beberapa pakar terlihat bahwa tatanan sosialnya mulai melemah. Kini para pemimpin masyarakatnya mencari upaya untuk mentata kembali tatanan social tersebut

sambil sekaligus mengubahnya melihat kepada kemajuan teknologi dan keterbukaan kehidupan. Inilah masalah pendidikan dan kebudayaan yang dihadapi oleh masyarakat Barat Pada sisi yang lain, kita lihat pengalaman yang dihadapi oleh Cina yang pernah mengalami tatanan sosial yang sangat kuat dan cenderung untuk menafikan otonomi individual(Deng Xiaoping, 1989).

3. "The New Golden Rule"

Di dalam masyarakat Indonesia yang pluralistis kita akan membangun suatu masyarakat yang demokratis. Kehidupan bermasyarakat secara demokratis di dalam arti yang sebenarnya perlu dipelajari dan dipraktekkan. Amitai Etzioni seorang pakar sosiologi yang terkenal mengemukakan beberapa kriteria pengembangan keberagaman di dalam rangka mencapai kesatuan (Amita Etzioni,199).

Kriteria tersebut antara lain ialah demokrasi adalah suatu nilai dan bukan hanya suatu prosedur. Hal ini berarti bahwa kehidupan bermasyarakat yang demokratis bukan hanya mentaati prosedur-prosedur tertentu tetapi yang penting ialah mewujudkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri seperli penghargaan terhadap pendapat yang berbeda dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Di dalam kebebasan tersebut diakui adanya hak asasi manusia yang sama. Di dalam kaitan ini diperlukan sikap yang netral, toleransi atau respek terhadap sesama anggota masyarakat. Di dalam pembinaan masyarakat yang terbuka diperlukan adanya dialog yang luas di dalam masyarakat. Cara-cara pemerintahan yang monolog adalah tidak sesuai dengan kehidupan demokrasi.

Dalam kehidupan yang demokratis terjadinya beda pendapat atau berseberangan pendapat merupakan suatu hal yang biasa. Hal Semacam ini justru sangat diperlukan dalam upaya rekonsiliasi yang menurut rumusan Nicholas Tavuchis mempunyai empat tingkat yaitu suatu usaha untuk saling memaafkan, tindakan memaafkan, saling mengampuni dan akhimya rekonsiliasi. Sedangkan dalam suatu masyarakat yang baik, diperlukan nilai-nilai inti yang diakui bersama (sharing core values). Masalahnya ialah apa yang menjadi kriteria dari nilai-nilai bersama tersebut?

C. PEDAGOGIK SUATU KEBUTUHAN

Krisis yang telah melanda ke hidupan masyarakat dan bangsa Indonesia dan oleh karenanya telah pula melahirkan suatu gerakan reformasi yang menuntut terbentuknya masyarakat baru Indonesia. Keterkaitan antara pendidikan dan kebudayaan serta seluruh kehidupan masyarakat, pada akhirnya juga akan menuntut paradigma baru pendidikan nasional (Tilaar,1999). Paradigma baru pendidikan nasional akan menentukan posisi atau reposisi dan reaktualisasi pendidikan nasional dalam upaya kita mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Di dalam kaitan ini kita perlukan suatu pedagogik baru yaitu pedagogik pembebasan yang sesuai dengan kehidupan masyarakat yang demokratis.

1. Masalah-masalah Kritis Pendidikan Masyarakat Madani di Indonesia

Di dalam membangun masyarakat Indonesia baru tentunya tidak terjadi di dalam sekejap atau semudah membalikan telapak tangan. Reformasi pendidikan merupakan suatu reformasi tingkah laku yang dengan sendirinya meminta waktu dan usaha yang ulet. Pendidikan yang merupakan aspek dari kebudayaan tidak mudah untuk diubah sebagaimana kebudayaan itu sendiri sulit untuk diubah dalam sekejap mata. Oleh sebab itu reformasi pendidikan haruslah bertahap dengan memperhitungkan berbagai potensi, kelemahan, kekuatan, dan kemungkinan yang terbuka. Dengan demikian reformasi pendidikan menuntut adanya perencanaan yang matang dan persiapan yang cukup serta ditopang oleh sumber-sumber yang memadai, termasuk komitmen politik masyarakat.

Di dalam membangun masyarakat Indonesia baru, masalah kritis pendidikan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam jangka menengah antara lain sebagai berikut: 1) Pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi. 2) Pengembangan hak asasi manusia. 3) Pemberantasan kemiskinan. 4) Pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan berarti bahwa nilai-nilai tersebut harus menjwai di dalam seluruh kegiatan pendidikan termasuk sistemnya, kurikulumnya, dan metodologi yang digunakan.

Praktek-praktek pendidikan yang indoktrinatif tidak sesuai dengan tujuan tersebut, juga kurikulum yang sangat sentralistik dan mematikan potensi individu. Proses belajar-mengajar yang mematikan inisiatif dan berpikir kreatif peserta didik sudah tidak lagi pada tempatnya.

Pendidikan berarti suatu proses humanisasi oleh sebab itu perlu dihormati hak-hak asasi manusia. Anak didik bukanlah robot tetapi manusia yang harus dibantu di dalam proses pendewasaannya agar dia dapat mandiri dan berpikir kritis. Selain daripada itu pendidikan merupakan hak asasi manusia, oleh sebab itu pemerataan pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsekuen. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan kemiskinan dan oleh sebab itu kemiskinan merupakan prioritas yang perlu ditanggulangi sejalan dengan pelaksanaan pemerataan itu sendiri. Selanjutan pengelolaan pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan haruslah diserahkan kepada masyarakat sendiri. Oleh sebab itu pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1939 dan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu dilaksanakan di dalam pengelolaan pendidikan (Tilaar, 1999). Pendidikan adalah sebagian dari kehidupan masyarakat oleh sebab itu masyarakat perlu secara aktif berpartisipasi di dalam pengelolaan pendidikannya sendiri.

2. Pedagogik Kritis Bagi Masyarakat Madani Indonesia

Pedagogik yang kita kenal di Indonesia dewasa ini adalah pedagogik dengan paradigma yang sangat sempit ialah cenderung melihat masalah pendidikan semata-mata sebagai masalah-masalah teknis di dalam ruangan kelas. Seperti telah diuraikan, pendidikan bukanlah semata-mata pengajaran tetapi pendidikan adalah berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya sekedar menjadikan peserta didik pandai menghafal tetapi yang lebih penting dari itu ialah menjadikannya sebagai manusia. Pendidikan adalah proses hominisasi dan proses humanisasi seseorang dalam kehidupan keluarga, masyarakat yang berbudaya kini dan masa depan. Dengan rumusan tersebut maka pandangan yang sempit mengenai pendidikan akan sulit berfungsi di dalam membangun masyarakat Indonesia baru yang demokratis dan bermoral.

Di dalam perkembangan pedagogik dewasa ini dapat kita identifikasikan lima aliran besar yaitu 1) aliran fungsionalisme dengan Durkheim dan Parsons, 2) aliran kulturalisme dengan Brameld dan Ki Hadjar Dewantara, 3) aliran kritikal dengan tokoh-tokohnya Marx, Bowles, Freire, Gyroux, dan Vygotsky, 4) aliran dengan tokohnya Bemstein, 5) aliran pasca modern dengannya Derrida, Foucault, Gramsci. Aliran-aliran tersebut di atas mempunyai pandangannya sendiri mengenai masa kini dan masa depan masyarakat yang diinginkan. Bagi aliran fungsionalisme, fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Masa dipersiapkan dengan mengajarkan fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan.

Aliran kulturalisme melihat fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya untuk merekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai masalah-masalah yang dihadapi dan upaya pendidikan ialah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti identitas bangsa, benturan kebudayaan, preservasi dan pengembangan budaya. Fungsi pendidikan ialah menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya yang universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global seperti teori TRIKON dari Ki Hadjar Dewantara.

Bagi aliran kritikal yang terbagi atas penganut teori konflik seperti Marx, Bowles juga yang menganut teori kritikal seperti Freire, Gyroux dan Vygotsky. Masa kini fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan. Sedangkan bagi Freire, Gyroux dan Vygotsky fungsi pendidikan ialah memberdayakan kaum tertindas (the oppressed). (Paulo Freire, *Pedagogy of Hope*, 1998) Pembangunan masyarakat masa depan bagi pedagogik kritikal ditekankan kepada pembinaan pemerataan ekonomi melalui perjuangan kelas seperti Marx, atau mengembangkan keaksaraan kritikal (critical literacy) bagi rakyat banyak.

Bagi aliran interpretatif, tugas pendidikan ialah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Sedangkan untuk masa depan pendidikan berfungsi untuk menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antara kelompok elit dan rakyat jelata yang miskin. Suatu aliran yang sangat populer

dewasa ini ialah aliran pasca modern.Kita mengenal pikiran-pikiran Derrida, Foucault, Gramsci yang sangat ekstrim. Bagi mereka fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebhinekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif.Individu yang diinginkan adalah individu yang kreatif dan berpikir bebas termasuk berfikir produktif

Aliaran-aliran pedagogik kritis di atas mempunyai suatu kesamaan ialah pemberdayaan individu. Inilah inti dari masyarakat demokratis. Sudah tentu aliran-aliran pedagogik kritis di atas mempunyai keterbaasan. Seperti yang diingatkan oleh Amitai Etzioni kebebasan atau otonomi individu bukanlah otonomi tanpa batas tetapi otonomi di dalam keseimbangan dengan tatanan sosial yang terkait kepada pengakuan akan nilai-nilai inti (core values) yang diakui bersama. Fungsi pendidikan di dalam masyarakat Indonesia baru ialah bukan pendidikan yang mempunyai individualisme yang egoistic, tetapi individu yang berkembang potensinya sehingga dapat disumbangkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama. Itulah individu yang hidup di dalam masyarakat madani Indonesia, yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia dan sekaligus sebagai manusia yang hidup damai dengan sesama umat manusia di planet bumi ini. Dengan sendirinya pendidikan untuk perdamaian dunia (world peace) merupakan salah satu agenda di dalam pendidikan membangun masyarakat Indonesia baru yaitu masyarakat madani Indonesia.

KESIMPULAN

Demikian pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan yaitu membebaskan individu dari kungkungan suatu struktur kekuasaan yang terpusat, yang menginjak-injak hak asasi manusia, yang membangun suatu struktur kekuasaan yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat dan menyengsarakan rakyat banyak. Pedagogik pembebasan adalah pedagogik yang memberdayakan peserta didik dalam

rangka membangun masyarakat Indonesia baru yaitu *masyarakat madani Indonesia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir.Revrison.d.cs. (1999), Pembangunan tanpa Perasaan, ELSAIM. IDEA, Pustaka Pelajar, Jakarta,
- Cremin. Lawrence A. (1989) Popular Education and its Discontents, Harver & Row, New York,
- Culla, Adi Suryadi, (1999) Masyarakat Madani, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta,
- Dewey, John, (1965) *Democracy and Education*, MacMillan. New York.
- Etzioni, Amitai, (1996) *The New Golden Rule*. Basic Books. New York..
- Fadjar, Abdullah, (1991) *Peradaban dan Pendidikan Islam*. Rajawali Press. Jakarta.
- Freire, Paulo (1998) *Pedagogy of Hope*, Continuum, New York.
- Freire, Paulo. (1998) *Pedagogy of Freedom Ethic Democracy and Civil Courage*, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland.
- Hikam, Muhammad A.S (1999). *Politik Kewarganegarsan. Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Hikam, Muhammad A.S (1996), *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES. Jakarta,
- Jalaludin Rakhmat (1999), *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi? Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Langgulung, Hasan (1981), *Beberapa Tinjauan dalam Pendidikan Islam*, Pustaka Antara, Kuala Lumpur.
- Noddings, Nel (1998), *Philosophy of Education*, Westview Press, Boulder.
- Sugiharto, I.Bambang (1996), *Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sutrisno, Mudji (1995), *Pendidikan Pemerdekaan*, Penerbit Obor, Jakarta,
- Tilaar, H.A.R. (1999) *Reposisi dan Reaktualisasi Sistem Pendidikan Nasional*, Makalah diskusi Reformasi Bidang Politik.Hukum.Ekonomi, dan Pendidikan diselenggarakan oleh BKP- IKAPTISI, Yogyakarta, 11-12 September.
- Tilaar, H.A.R, (1999). *Desentralisasi Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Rangka Pelaksanaan UU-RI No. 22 dan UU-RI No. 25 Tahun 1999*.
- Tilaar, H.A.R, (1999). *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Rosdakarya, Bandung,

*Penulis adalah alumni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU